

PENULISAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM URUSAN PERKERETAAPIAN**

(Studi Kasus Di Perlintasan Sebidang *Fly Over* Janti)



Diajukan oleh:

Kornelius Niko Purwanto

NPM : 160512527

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM URUSAN PERKERETAAPIAN**

(Studi Kasus Di Perlintasan Sebidang *Fly Over* Janti)



Diajukan Oleh:

Kornelius Niko Purwanto

NPM : 160512527

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan**

Telah Disetujui Setelah Diperbaiki

Berdasarkan Masukan Dalam Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Mei 2020

B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM URUSAN PERKERETAAPIAN**

(Studi Kasus Di Perlintasan Sebidang *Fly Over* Janti)



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

**Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Mei 2020

**Tempat : Kos Ibu Sungkono, Jalan Raya Janti,
No. 43 A Karang Jambe, Banguntapan,
Bantul.**

(secara *online* melalui *video conference*)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "W. Riawan Tjandra", is written over a set of horizontal dotted lines. The signature is stylized and somewhat cursive.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Everything will probably never be ok, but we have to try for it”

Vladimir Putin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis Bapak Djoko Purwanto dan Ibu Agnes Marni tercinta yang selalu percaya kepada penulis dan selalu memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis dari awal pertama dalam pertimbangan untuk melanjutkan kuliah lagi sampai dengan selesainya penulisan hukum skripsi ini.

Kepada kakak dan adik-adik penulis, Dominika Anggreini Purwaningsih, Isidorus Kurniadi Purwanto dan Angelus Mardi Purwanto yang selalu memberikan dukungan baik dalam materi dan non materi.

Kepada Diana Dessy Novitasari yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan dorongan untuk mengerjakan skripsi ini.

Kepada Alam Semesta yang telah memberikan kehidupan bagi penulis.

Kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Almamater.

KATA PENGANTAR

Segala hormat dan puji syukur penulis kepada Alam Semesta dan segala sesuatu yang disebut “Tuhan/Allah” atas segala kesempatan, tempat dan berkat serta kasih-Nya yang telah dilimpahkan dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi dengan judul **“KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM URUSAN PERKERETAAPIAN (Studi Kasus Di Perlintasan Sebidang *Fly Over* Janti)”** dengan baik.

Dalam penulisan hukum ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dan bantuan. Untuk itu penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan dan mengesahkan proposal sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, arahan, ide, nasihat serta motivasi yang sangat membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik penulis dari awal kuliah sampai dengan sekarang.

4. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Bapak Yohanes Nunung Dwi Saputro yang telah memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
5. PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI, khususnya Manager Hukum Ibu Wisny Tri Ariyanti yang telah memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
6. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo selaku dosen sekaligus narasumber penulis yang telah memberikan informasi dan ide terkait penulisan skripsi ini.
7. Segenap Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Teman-teman dan sahabat penulis di kampus dan di luar kampus. Jaya, Phillip, Elfan, Pandu, Rey, Refis, Tri, Wili, Banyu, Andri, Tio, Fahri, Echa, Adine, Nadia, Twina, There dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.
9. Keluarga besar *Naval Special Operation Force* (NSOF) selaku klub *airsoft gun* penulis yang juga memberikan semangat dan hiburan bagi penulis.
10. Teman-teman Seneng Main Sukir Yogyakarta selaku teman main *airsoft gun* penulis selama di Yogyakarta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan bantuan menyelesaikan skripsi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan membutuhkan penyempurnaan dari skripsi yang ditulis, sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pihak penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2020

Penulis,

Kornelius Niko Purwanto

ABSTRACT

There were three research problem addressed in the research which are (1) Is the authority of the central government to carry out closure of level crossings under Janti fly over in accordance with the applicable laws and regulations? (2) Is the local government authorized in government affairs in the field of train transport? (3) what is the solution that can be offered in solving this problem? the purpose of this study is to find out whether the closure of level crossing by the central government is in accordance with existing legislation, find out whether local governments have authority in train transport affairs and find solutions that can be offered in resolving these problems. The research method used by the author is a normative method by comparing rules with one another. The results of this study are that the central government in closing the level crossing is in accordance with existing legislation, however the closing was not accompanied by the issuance of KTUN, that the regional government also has authority in railroad matters but in this case only certain types of trains that only operate in their area, the solution that can be offered in this problem is that Janti community can make a lawsuit against the law by the government because the closure is not in accordance with the principles of good governance.

Keywords: Authority, Level Crossing, Central Government, Local Government

ABSTRAK

Ada tiga masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah wewenang pemerintah pusat untuk melakukan penutupan penyeberangan sebidang di bawah Janti sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku? (2) Apakah pemerintah daerah berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang transportasi kereta api? (3) apa solusi yang dapat ditawarkan dalam menyelesaikan masalah ini? tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penutupan perlintasan sebidang oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang ada, mencari tahu apakah pemerintah daerah memiliki otoritas dalam urusan transportasi kereta api dan menemukan solusi yang dapat ditawarkan dalam menyelesaikan masalah ini. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif dengan membandingkan aturan satu sama lain. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dalam menutup perlintasan sebidang sesuai dengan Undang-Undang yang ada, namun penutupan itu tidak disertai dengan penerbitan KTUN, bahwa pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam hal perkeretaapian tetapi dalam hal ini hanya Jenis kereta yang hanya beroperasi di daerahnya, solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah masyarakat Janti dapat mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah karena penutupannya tidak sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kata kunci: Kewenangan, Perlintasan Sebidang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Moto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Pernyataan Keaslian	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	18
BAB II PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	22
1. Pengertian Kewenangan	22
2. Sumber Kewenangan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	26
1. Pengertian Pemerintah Pusat	26
2. Pengertian Pemerintah Daerah	29

3. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	34
4. Teori Residu	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perkeretaapian.....	37
1. Pengertian Perkeretaapian	37
D. Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Perkeretaapian (Studi Kasus Penutupan Perlintasan Sebidang <i>Fly Over Janti</i>)	38
1. Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Melaksanakan Penutupan Perlintasan Sebidang Di Bawah <i>Fly Over Janti</i> Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.....	38
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Perkeretaapian.....	43
3. Solusi Yang Bisa Ditawarkan.....	49
 BAB III PENUTUP	 50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA	 53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang ditulis ini adalah hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lainnya, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2020

Yang menyatakan,

Kornelius Niko Purwanto